

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia serta berdomisili di Indonesia. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1, UMKM dijelaskan dalam tiga kelompok usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 6, yaitu memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha maksimal Rp50.000.000,00, atau memiliki omzet tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki, menguasai, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar serta memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 6, yaitu memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) lebih dari

Rp50.000.000,00 – Rp500.000.000,00; atau memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) Rp300.000.000,00 – Rp2.500.000.000,00 (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008).

Usaha menengah merupakan usaha mandiri produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar yang memiliki total kekayaan bersih. penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha melebihi Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan (omzet) sebesar Rp2.500.000.000,00 – Rp5.000.000.000,00 (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008).

Sementara definisi UMKM menurut standar akuntansi keuangan yang mengaturnya yaitu SAK EMKM, UMKM didefinisikan sebagai entitas usaha tanpa akuntabilitas publik yang telah berjalan selama minimal dua tahun dan memenuhi kriteria sebagai UMKM sesuai peraturan perundang-undangan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016).

2.2. Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kieso et al. (2018), laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menginformasikan aktivitas bisnis dan kinerja keuangan suatu entitas. PSAK 1:2014 menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan merupakan informasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode akuntansi berjalan. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual.

Menurut Kieso et al. (2018), laporan keuangan terdiri atas 5 elemen yaitu.

1. Aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat menghasilkan potensi ekonomi bagi entitas di masa depan.
2. Liabilitas, yaitu kewajiban kini entitas yang perlu di bayarkan (mengakibatkan arus kas/aset keluar) sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu.
3. Ekuitas, yaitu kepentingan residual entitas yang di peroleh dari hasil pengurangan aset dengan seluruh liabilitas/kewajiban yang dimiliki entitas.
4. Pendapatan, yaitu peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas karena peningkatan manfaat ekonomi sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan yang bersifat kas masuk selama periode akuntansi berjalan.
5. Beban, yaitu penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas karena penurunan manfaat ekonomi sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan yang bersifat kas masuk selama periode akuntansi berjalan.

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan disusun adalah untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas bagi pengguna laporan keuangan dalam hal ini pihak eksternal maupun pihak internal entitas dalam membuat keputusan ekonomi. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas

seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2020).

Kieso et al. (2018) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang dapat menggambarkan kondisi dan perubahan yang terjadi pada suatu entitas, sehingga dalam penyajian laporan keuangan disajikan dalam dua periode komparatif. Pelaporan keuangan penting dalam pengambilan keputusan bisnis untuk kelangsungan usaha di masa. Laporan keuangan yang disajikan harus mudah dipahami, menyajikan informasi yang jujur dan benar terkait kinerja entitas, andal dan dibandingkan agar hasil informasi yang dihasilkan bisa memberikan manfaat bagi penggunaannya.

2.3. SAK EMKM

2.3.1. Pengertian SAK EMKM

SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah standar akuntansi yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dalam upaya menciptakan laporan keuangan dengan pengakuan, pengukuran serta penyajian akuntansi yang baku agar dapat dibandingkan antara laporan keuangan tahun sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh pelaku UMKM atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) serta memenuhi definisi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang

UMKM paling kurang dua tahun berturut-turut (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016). SAK EMKM terdiri dari 18 bab pembahasan utama serta mulai berlaku efektif 1 Januari 2018.

Sebelum SAK EMKM digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi keuangan bagi entitas kecil dan menengah menggunakan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau dikenal sebagai SAK ETAP. Dalam praktiknya, SAK ETAP belum mampu di praktikkan oleh para pelaku UMKM karena lebih rumit serta beberapa aspek yang kurang sesuai dengan kondisi bisnis pelaku UMKM. Untuk terus mendukung kemajuan UMKM sebagai salah penyokong perekonomian Indonesia, serta untuk mendukung kebutuhan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, DSAK IAI telah merilis standar akuntansi keuangan bagi badan usaha mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM). Jika dibandingkan dengan SAK ETAP, SAK EMKM adalah standar yang lebih sederhana dan mudah sehingga akan lebih memudahkan bagi entitas yang tidak mampu atau tidak memenuhi standar/persyaratan akuntansi yang ditetapkan dalam SAK ETAP. Dengan adanya SAK EMKM diharapkan dapat mempermudah para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara mandiri dan efisien, sehingga kedepannya UMKM bisa lebih maju dan terus mendukung perekonomian Indonesia lebih baik.

2.3.2. Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

SAK EMKM (2016) menyebutkan bahwa laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan entitas terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode. Informasi yang

disajikan dalam laporan posisi keuangan mencakup akun-akun seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, serta ekuitas. Dalam penyajian akun-akun dalam laporan posisi keuangan, SAK EMKM tidak mensyaratkan urutan yang tepat.

Biswan & Mahrus (2020) menyebutkan bahwa dalam praktiknya, entitas menyajikan laporan posisi keuangannya menggunakan urutan aset yang dimulai dari aset yang paling lancar kemudian aset tidak lancar, selanjutnya liabilitas lancar/liabilitas jangka pendek, liabilitas tidak lancar/liabilitas jangka panjang dan yang terakhir ekuitas. Secara garis besar, laporan posisi keuangan di klasifikasikan menjadi 3 unsur utama. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

2.3.2.1. Aset

Pengertian aset menurut Warfield dkk. (2018, hal. 320) adalah. *“Resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity”*. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Aset dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu aset lancar dan aset tidak lancar.

1. Aset Lancar

Biswan & Mahrus (2020) mendefinisikan aset lancar sebagai kas dan aset lainnya yang diharapkan entitas dapat dikonversi kedalam bentuk lain seperti uang tunai, penjualan, atau konsumsi dalam waktu kurang dari satu periode. Dalam SAK EMKM dijelaskan lebih lanjut terkait dengan kriteria yang dapat dijadikan patokan dalam mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar yaitu dapat dimanfaatkan dalam

jangka waktu satu tahun ataupun satu siklus operasi normal entitas (selama waktu yang dibutuhkan dari pengeluaran kas saat pembelian aset hingga penerimaan kas dari pemanfaatan aset). Pos-pos yang digolongkan dalam aset lancar diantaranya kas dan setara kas, persediaan, piutang, beban di bayar dimuka, investasi jangka pendek.

2. Aset Tidak Lancar

Berdasarkan pengertian yang dicantumkan dalam SAK EMKM (2016), Aset tidak lancar merupakan semua aset yang tidak termasuk dalam aset lancar yang memberikan masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu periode akuntansi. Singkatnya, aset tidak lancar merupakan aset yang tidak masuk dalam kriteria aset lancar yang digolongkan dalam empat bagian utama yaitu PPE (*Property, Plants, and Equipments*) seperti tanah, mesin, bangunan, kemudian digolongkan sebagai aset tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, juga digolongkan sebagai investasi jangka panjang dan aset lain-lain seperti kas yang dibatasi penggunaannya (Biswan & Mahrus, 2020).

2.3.2.2. Liabilitas

SAK EMKM menyatakan bahwa liabilitas/kewajiban adalah kewajiban saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang pelunasannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan saat tanggal jatuh tempo/saat terjadinya pelunasan utang. Sama halnya dengan aset, liabilitas juga dikelompokkan dalam dua bagian besar yaitu liabilitas lancar/liabilitas jangka

pendek dan liabilitas tidak lancar/liabilitas jangka panjang (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016).

Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika dapat dilunasi dalam satu tahun, tidak ada hak khusus untuk melunasi utang lebih dari satu tahun. Yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek diantaranya utang usaha, utang gaji, utang pajak penghasilan, pendapatan diterima di muka, serta kewajiban lainnya yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan (Biswan & Mahrus, 2020). Berkebalikan dengan liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban entitas yang masa jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Contoh liabilitas jangka panjang yang paling umum seperti utang obligasi, wesel bayar, kewajiban sewa.

2.3.2.3. Ekuitas

Kieso et al. (2018, hal. 58) menyatakan bahwa: *“Equity, or Net Assets, is the residual interest in the assets of an entity that remains after deducting its liability”*. Senada dengan itu, SAK EMKM (2016) menyatakan bahwa ekuitas merupakan hak sisa atas aset setelah dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas mencakup modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba rugi entitas yang diperoleh dari selisih antara penghasilan dengan beban setelah dikurangkan dengan dividen yang dibayarkan. Ekuitas bagi badan usaha yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi badan usaha tersebut (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016).

Gambar II.1 Format Laporan Posisi Keuangan menurut SAK EMKM

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
ASET	Catatan	20x8	20x7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
<i>JUMLAH ASET</i>		<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS</i>		<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
<i>JUMLAH EKUITAS</i>		<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
<i>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</i>		<i>xxx</i>	<i>xxx</i>

Sumber: SAK EMKM (2016)

2.3.3. Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK EMKM

Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur kinerja keuangan perusahaan selama siklus operasi normal entitas dan mencerminkan aktivitas operasional entitas (Subramanyam & Wild, 2009). Dalam SAK EMKM Bab V disebutkan bahwa laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos diantaranya pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak.

2.3.3.1. Pendapatan

Pendapatan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomis dalam satu periode berupa arus masuk/peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang meningkatkan ekuitas, di luar kontribusi pemegang saham (Biswan & Mahrus, 2020). Pendapatan

berasal dari hasil kegiatan operasional utama yang dilakukan oleh entitas seperti hasil penjualan barang dagang, pemasukan atas jasa yang telah dilaksanakan, maupun pendapatan lainnya yang sesuai dengan sektor bisnis utama entitas. Dalam Bab XIV SAK EMKM, dijelaskan bahwa pendapatan diakui oleh entitas ketika terdapat hak atas pembayaran yang akan diperoleh pada masa sekarang maupun masa mendatang.

2.3.3.2. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi pada periode tertentu berupa penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas sebagai akibat dari kegiatan operasional, di luar kontribusi kepada pemegang saham (Biswan & Mahrus, 2020). Dalam Bab II SAK EMKM (IAI,2016), dijelaskan bahwa beban merupakan biaya yang mungkin timbul dari aktivitas normal entitas maupun kerugian entitas. Beban yang timbul dari aktivitas normal entitas dapat mencakup beban pokok penjualan, beban imbalan kerja, beban sewa, dan beban penyusutan. Kerugian merupakan beban yang muncul bukan dari aktivitas normal perusahaan seperti pelepasan aset.

Gambar II.2 Format Laporan Laba Rugi menurut SAK EMKM

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
PENDAPATAN	Catatan	20x8	20x7
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM (2016)

2.3.4. Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Dalam Bab VI SAK EMKM (IAI, 2016) dijelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan berisi pernyataan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan SAK EMKM, Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, informasi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang memberikan penjelasan terkait transaksi penting dan material sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.